

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Atmadja Arifin P. Soeria, 2009, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Atmadja Arifin P. Soeria dkk, 2011, *Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara (sumber-Sumber Keuangan Negara)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Ham, Jakarta.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif, dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Koentjoroningrat, 1979, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia.
- Marzuki Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Rooseno dkk, 2014, *Penelitian Hukum tentang Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM, Jakarta,.
- Soemardjono Maria S. W, 2011, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Program Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Soemitro Ronny Hanitijo, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sundari Siti, 2011, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementrian Hukum dan HAM RI.
- Sutedi Adrian, 2009, *Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam kerangka otonomi daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutedi Adrian, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutedi Adrian, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Tamidi Lepi T., 1999, *Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Jakarta.

Tansil C.S.T dan Christine S.T. Kansil, 2008, *Hukum Keuangan dan Perbendaharaan Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Tim BAPEKA, 1998, *Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan*, Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, BAPEKA RI, Jakarta.

Tim UGM dan UI, 2010, *Alternatif Struktur OJK yang Optimun*, UGM dan UI.

Tjandra W. Riawan, 2014, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66.

KARYA ILMIAH, SKRIPSI, TESIS, DISERTASI:

Amrullah, Afif, 2014, Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Industri Jasa Keuangan di Indonesia Berdasar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- Mochtar, Zainal Arifin, 2012, Penataan Lembaga Negara Independen Setelah Perubahan Undang-undang Dasar 1945, *Disertasi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Nugroho, Tri Satyo, 2015, , Ratio Legis Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pungutan Terhadap Lemabaga Jasa Keuangan, *Karya Ilmiah*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Suryo, Prasetyo Wahyu Adi, 2014, Aspek Hukum Terhadap Barang/Aset yang digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Permasalahan Bagaimana Status Hukum Aset OJK, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Yumya, Afika, 2008, Pengaruh Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kewenangan Bank Indonesia Dibidang Pengawasan Perbankan, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

JURNAL:

- Indrawati, 2012, “Prinsip *Good Financial Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Negara dalam Rangka Mewujudkan *Clean Governance*”, *Jurnal Perspektif*, Volume XVII No. 3 Tahun 2012, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya.
- Kaihatu, Thomas S., 2006, “Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia”, *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, Vol. 8, No. 1, Maret 2006, Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Mailinda Eka Yuniza dan Adrianto Dwi Nugroho, 2011, “Mekanisme Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Murdadi, Bambang, 2012, “OJK Lembaga Pengawas Baru yang Memiliki Kewenangan Penyidikan” *Jurnal Value Added*, Volume 8, Nomor 2, Maret 2012 – Agustus 2012, Manajemen Unimus, Semarang.
- Simatupang, Dian N Puji, 2006, Hakikat Keuangan Negara dalam Bank Indonesia dan Gagasan Arsitektur Keuangan Publik Sebagai Konsep Pengaturan Keuangan yang Berbasis pada Prinsip Badan Hukum “, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksetralan*, Volume 4, No.3, Desember 2006, Bank Indonesia, Jakarta.

Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, 2012, “Efektivitas Sistem Penyeleksian Pejabat Komisi Negara di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 3, September 2012, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

KAMUS :

Henry Campbel Black, 1968, *Blacks Law Dictionary*, West Publishing, St. Paul.

INTERNET:

Fat ,2014, Ramai-Ramai Mempersoalkan Aturan Pungutan OJK, www.hukumonline.com, diakses tanggal 28 Oktober 2015.

Fuad, Hafid, 2014, Industri Jasa Keuangan Kritik Pungutan OJK, <http://ekbis.sindonews.com/>, diakses tanggal 02 November 2015.

Qorib, Fathan, 2013, Pakar Pertanyakan Status Keuangan OJK, <http://www.hukumonline.com/> , diakses tanggal 8 Oktober 2015.

Selamat Datang Wasit Baru Industri Keuangan, <http://lipsus.kontan.co.id/v2/ojk/read/86/Selamat-datang-wasit-baru-industri-keuangan>, diakses tanggal 10 Desember 2015.

Sylke, 2014, Pungutan OJK Berpotensi Kurangi Independensi Pengawasan, 2014, www.neraca.com, diakses tanggal 19 Januari 2016.

Wiyanti, Sri, 2012, Biaya operasional OJK 2014, <http://www.merdeka.com>, diakses tanggal 8 Oktober 2015.

Yoga, Benediktus, 2016, Industri Asuransi Menilai Pungutan OJK terlalu besar, www.keuangan.kontan.id, diakses tanggal 07 Juli 2016.

Humas OJK, 2016, Frequently Asked Questions Otoritas Jasa Keuangan, , www.ojk.go.id, diakses tanggal 11 Juli 2016



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS KEUANGAN DAN MEKANISME PENGELOLAAN
PUNGUTAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**
DEMSON TIOPAN, Dwi Haryati, S.H., M.H.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>